

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dulu, permasalahan Hubungan Internasional tidak bisa dilepaskan dari aspek keamanan nasional. Secara sederhana keamanan dapat diartikan sebagai situasi di mana negara terbebas dari ancaman militer ataupun paksaan politik. Selain itu, keamanan nasional merupakan ukuran kemampuan negara dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensional yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kelangsungan hidup rakyatnya (Romm, 1993).

Negara merupakan aktor penting Hubungan Internasional yang menentukan keamanan dunia. Dalam beberapa mazhab teori Hubungan Internasional, khususnya yang beraliran realisme, negara menjadi sumber utama setiap konflik yang terjadi di dunia. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarki, negara bersifat rasional yang artinya negara cenderung mengejar kepentingan pribadi yaitu meraup sumber daya sebanyak mungkin, tidak ada aktor di atas negara yang mampu mengatur interaksinya, dan keinginan negara untuk bertahan hidup adalah segala-galanya, itulah kenapa negara membangun militer (Goodin, 2010, hal. 32). Istilah negara pertama kali diperkenalkan pada abad pertengahan pasca Perjanjian Westphalia (*The Treaty of Westphalia*). Perjanjian ini dianggap sebagai sebuah batu loncatan dalam sistem negara modern. Sebelum Westphalia, organisasi otoritas politik Eropa abad pertengahan masih didasarkan pada ordo keagamaan hierarkis (Kissinger, 2014).

Sejak adanya perjanjian Westphalia inilah kemudian masyarakat global mulai mengenal istilah kedaulatan. Kedaulatan merupakan unsur penting sebuah negara dalam melakukan aktivitas Hubungan internasional. Mengacu pada standar *Rex est imperator in regno suo* kedaulatan adalah hak penguasa untuk sepenuh otonom¹ terhadap wilayahnya sendiri. Berdaulat juga berarti bahwa negara tidak tunduk dengan kemauan politik penguasa atau negara lain. Sebelum 1648 menghormati kedaulatan kekuasaan lain bukan hal yang lumrah untuk dilakukan. Kedaulatan memang merupakan hak dasar bagi manusia, tapi tetap saja selalu ada imperium ambisius yang ingin merebut hak tersebut.

Keamanan adalah hal penting bagi negara, tanpa keamanan mustahil sebuah negara mampu berdiri tegak. Ketidakmampuan sebuah negara menjamin keamanannya sendiri dapat

¹ Berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri

mengakibatkan negara tersebut rawan terhadap berbagai ancaman baik yang datang dari luar maupun dalam negeri. Mengacu pada World Governance Index, ada lima indikator untuk mengukur keberhasilan sebuah negara, yaitu Perdamaian dan Keamanan (*Peace and Security*), Aturan Hukum (*Rule of Law*), Partisipasi dan Hak Asasi Manusia (*Human Rights and Participation Indicator*), Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), dan Pengembangan Manusia (*Human Development*). Perdamaian dan Keamanan menjadi indikator pertama memperlihatkan betapa pentingnya stabilitas keamanan sebuah negara demi menunjang kehidupan bernegara. Jika sebuah negara gagal memberikan keamanan maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai *failed state* karena gagal menjalankan tanggung jawab dan menjamin hak-hak dasar warganya (World Governance Index, 2011).

Amerika Serikat sebagai sebuah negara berdaulat tentunya sangat memperhatikan keamanan nasionalnya. Selama bertahun-tahun isu keamanan selalu menjadi prioritas bagi Amerika Serikat terlepas siapapun presidennya, entah dari Demokrat atau Republik. Dikutip dari situs web whitehouse.gov:

Rebuilding U.S. deterrence to preserve peace through strength must be our Nation's top priority. The unprecedented era of peace that followed World War II revealed that the free world is safest when America is strongest. The Slow depletion of our military in recent years has resulted in an escalation of threats the world over, which President Trump is committed to reversing. (White House, 2012)

Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat bermaksud mencapai kemandirian nasionalnya melalui peningkatan dan penguatan militer. Amerika Serikat juga percaya bahwa keamanan dunia internasional dapat dicapai apabila Amerika Serikat sebagai adidaya bersikap lebih agresif dalam merespon ancaman-ancaman yang dapat membahayakan dunia.

Salah satu ancaman yang saat ini tengah menjadi fokus utama Amerika Serikat adalah program pengembangan senjata nuklir Korea Utara atau yang disebut *Inter-Continental Ballistic Missile Program (ICBM)*. Program tersebut dimulai pada tahun 2006, sebuah uji coba senjata nuklir dilakukan di wilayah Punggye-ri, provinsi Kilju, Korea Utara. Peristiwa ini langsung direspon oleh dunia internasional melalui *Six Party Talks* yang beranggotakan Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Rusia, dan tentu saja Amerika Serikat. Pada pertemuan yang dilaksanakan pada bulan Desember 2006 pasca uji coba senjata nuklir oleh Korea Utara, *Six Party Talks* memfokuskan perundingan untuk mendenuklirisasi Korea Utara (Farida, 2013, hal. 1-13). Hasilnya, pada bulan Juli 2007, Korea Utara sepakat untuk melakukan denuklirisasi dengan melucuti senjata nuklirnya di Yongbyon dan menghentikan

program pengembangan senjata nuklir sebagai ganti atas diberikannya bantuan bahan bakar (*fuel aid*) sekaligus normalisasi hubungan diplomatik dengan Jepang serta Amerika Serikat (BBC News, 2007).

Ternyata program nuklir Korea Utara tidak benar-benar dihentikan, pada tanggal 25 Mei tahun 2009 kembali terjadi uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara di daerah yang sama seperti sebelumnya namun kali ini menggunakan rudal yang diledakkan di bawah tanah (*underground nuclear test*) (Paramanandani, 2010). Menyusul peristiwa tersebut, Amerika Serikat mengancam kegiatan nuklir yang dilakukan Korea Utara dan tensi kedua negara pun meningkat. Hal ini diperparah dengan dipenjarakannya dua orang jurnalis Amerika Serikat yang dituduh masuk secara ilegal ke Korea Utara. Satu tahun kemudian Korea Utara diduga kuat menenggelamkan kapal militer Cheonan milik Korea Selatan, akibatnya Amerika Serikat kembali melabeli Korea Utara sebagai ancaman terhadap keseimbangan dunia (The Guardian, 2010).

Tensi kedua negara sebenarnya sempat mereda ketika Amerika Serikat dan Korea Utara menandatangani *Leap Day Agreement* pada bulan Februari 2012 yang berisi tentang skema pemberian bantuan oleh Amerika Serikat kepada Korea Utara apabila program pengembangan senjata nuklirnya dihentikan. Tentu saja jika Korea Utara terus melanjutkan program nuklirnya maka bantuan akan segera dicabut. Sayangnya Korea Utara sendiri nampaknya tidak begitu peduli dengan *Leap Day Agreement*, terbukti pada tanggal 12 Februari tahun 2013 Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir di tempat yang sama seperti sebelumnya namun kali ini memakai bom yang lebih kuat dengan daya yang diperkecil. Gempa bumi sebesar 5.1 skala richter dirasakan hingga ke Tiongkok (Cordesman, 2016).

Amerika Serikat geram melihat tingkah laku Korea Utara yang melanggar komitmennya. Melalui Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat mengusulkan draf resolusi yang berisikan pembatasan ekspor bahan bakar ke Korea Utara hingga 90%. Draft resolusi tersebut disepakati dan sanksi keras yang meliputi pembatasan ekspor bahan bakar, embargo ekonomi, inspeksi kargo dan lainnya mulai diberlakukan (Branigan & MacAskill, 2013).

Tiga tahun kemudian, serangkaian uji coba senjata nuklir kembali dilakukan Korea Utara, antara lain:

Tabel 1.1 Kronologi Uji Coba Senjata Nuklir Korea Utara Pasca Sanksi PBB

Waktu		Daerah	Tempat diledakkan	Keterangan
6 Januari 2016, 01:30:01 PYT		Punggye-ri, Provinsi Kilju	Bawah tanah	Terjadi ledakan bom di Punggye-ri, Provinsi Kilju. Televisi lokal Korea Utara melaporkan bom tersebut sebagai uji coba bom hidrogen yang dipersiapkan pemerintah Korea Utara untuk menghadapi Amerika Serikat
9 September 2016, 00:30:01 PYT		Punggye-ri, Provinsi Kilju	Bawah tanah	Pemerintah Korea Utara mengumumkan telah berhasil mengetes hulu ledak tingkat tinggi yang mampu bekerja dengan rudal. Uji coba ini dilakukan tepat setelah tentara gabungan Amerika Serikat dan Korea selatan melakukan latihan militer bersama.
3 September 2017, 03:30:01 PYT		Punggye-ri, Provinsi Kilju	Bawah tanah	Gempa berkekuatan 5,7 skala richter terdeteksi di daerah Punggye-ri, provinsi Kilju. Pemerintah Korea Utara mengkalim gempa bumi tersebut disebabkan oleh ledakan bom hidrogen. Jika dilihat dari kekuatannya, gempa ini adalah yang terbesar dibandingkan sebelumnya.

Sumber: www.cbsnews.com (2017).

Berbagai upaya dilakukan Amerika Serikat untuk menghilangkan ancaman nuklir Korea Utara. Presiden Donald Trump menginisiasi pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi² Kim Jong-Un yang diadakan pada bulan Juni 2018. Menjadikan Presiden Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pertama yang mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Tertinggi Korea Utara. Upaya diplomatik terus dilakukan, terhitung keduanya sudah bertemu sebanyak tiga kali, pertemuan terakhir terjadi di Zona Demiliterisasi Korea Selatan-Korea Utara pada tanggal 30 Juni 2019 (Sullivan & Allyn, 2019). Menariknya, selain melakukan upaya diplomatik dengan mengedepankan perdamaian, Amerika Serikat juga melakukan pendekatan tradisional dengan mempersiapkan militernya untuk berhadapan dengan kemungkinan terburuk melawan Korea Utara. Salah satu benteng pertahanan Amerika Serikat untuk menghadapi Korea Utara adalah Guam.

Guam, merupakan sebuah wilayah kepulauan di bawah *organized unincorporated territory*³ Amerika Serikat. Guam terletak di bagian barat Samudra Pasifik tepatnya di antara 13,2 ° LU - 13,7 ° LU dan antara 144,6 ° BT - 145,0 ° BT. Berada di bawah kedaulatan Amerika Serikat tentu saja bisa membuat Guam sebagai pangkalan militer Amerika Serikat. Dewasa ini sepertiga wilayah kepulauan Guam merupakan rumah bagi pangkalan militer Angkatan Laut (Naval Base Guam) dan Angkatan Udara (Andersen Air Force Base) Amerika Serikat dengan total lebih dari 6000 prajurit. Menilik lokasinya, memang Andersen Air Force Base & Naval Base Guam tidak lebih dekat dibanding pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang dan Korea Selatan yang langsung berhadapan dengan Korea Utara. Namun, kedua pangkalan militer tadi tidak berada di bawah wilayah kedaulatan Amerika Serikat, artinya apabila terjadi mekanisme pertahanan nuklir yang berlebihan di kedua pangkalan militer tersebut ada kemungkinan dunia internasional tidak tinggal diam dan justru berbalik menyerang Amerika Serikat (Military Bases, 2017).

² *Supreme Leader*

³ Sebuah wilayah di luar negara bagian Amerika Serikat yang berada di bawah hukum dan kendali Amerika Serikat.

Perhatikan gambar di bawah:



Gambar 1.1
Peta Lokasi Strategis Guam dalam Menghadapi Korea Utara

Sumber: www.max-security.com (2015)

Mengacu pada fakta-fakta yang ada, melalui karya tulis ini, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan posisi strategis Guam sebagai wilayah *unincorporated territory* untuk menghadang agresivitas pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang penulis ajukan adalah bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan posisi strategis Guam sebagai wilayah *unincorporated territory* untuk menghadang agresivitas pengembangan senjata nuklir Korea Utara?

1.3 Kerangka Pemikiran

1.3.1 Realisme Defensif (*Defensive Realism*)

Realisme defensif merupakan buah pemikiran realisme, salah satu paradigma utama dalam Hubungan Internasional. Asumsi dasarnya berakar dari pemikiran bahwa negara sebagai satu keutuhan merupakan aktor terpenting dalam Hubungan Internasional yang bersifat rasional dan keamanan negara dalam hal *survivability* adalah prioritas utama di dalam sistem internasional yang anarki. Apabila dirincikan, asumsi umum teori realis berpusat pada empat ide utama (Goodin, 2010), yaitu:

1. Sistem internasional bersifat anarki.

Situasi sistem internasional yang anarki; kacau, tidak teratur, konflikual, tanpa pemimpin/otoritas—membuat sistem internasional tidak memiliki kekuatan koersif yang superior secara hierarkis di atas negara untuk menyelesaikan masalah, memberlakukan hukum, dan menata sistem politik internasional agar menjadi aman. Artinya, tidak ada aktor lain di atas negara yang mampu mengatur bagaimana negara berinteraksi satu sama lain. Negara bebas membina sendiri hubungannya dengan negara lain tanpa harus diatur oleh entitas yang lebih tinggi darinya.

2. Negara adalah aktor terpenting dalam Hubungan Internasional.

Aktor-aktor non-negara tidak diperhitungkan.

3. Negara adalah aktor tunggal yang bersifat rasional.

Negara dianggap akan selalu memikirkan dirinya sendiri dan mengambil keputusan yang sifatnya menguntungkan (rasional) baginya. Realisme juga menyatakan bahwa kerja sama antar negara bersifat sementara, konsensus yang terjadi dalam kerja sama hanya akan efektif apabila itu sejalan dengan kepentingan pribadi negara, jika tidak maka negara dapat dengan mudah mengesampingkan konsensus tersebut. Tujuan utama negara adalah meraup sumber daya sebanyak mungkin untuk bertahan hidup.

4. Permasalahan utama setiap negara adalah kelangsungan hidup (*survival*)

Kelangsungan hidup merupakan prioritas utama negara, segala macam interaksi antar negara dilakukan atas dasar tersebut. Itulah kenapa negara *self-help* dalam hal membangun militer. Keberadaan negara lain dianggap sebagai ancaman karena negara tidak bisa mempercayai negara lain yang diasumsikan mementingkan dirinya sendirinya, terlebih ketika negara lain juga membangun militer.

Berakar dari empat ide utama di atas, kemudian cendekiawan Hubungan Internasional yang beraliran Neorealisme (Realisme Struktural) memperkecil ruang pemikiran dengan

berfokus pada struktur anarkis sistem internasional. Negara memang merupakan aktor utama Hubungan Internasional, tetapi perilakunya sebagian besar dipengaruhi oleh struktur sistem internasional yang anarkis. Ketiadaan entitas politik di atas aktor negara memaksa negara untuk bersiap-siap terhadap kemungkinan terburuk yaitu perang. Oleh sebab itu, untuk menjamin keamanan negara, maka negara harus bersiap menghadapi perang dengan cara membangun ekonomi dan militer. Dari sini terlahirlah arah pemikiran baru seperti realisme ofensif, teori hegemoni, dan tentu saja realisme defensif.

Realisme defensif menganggap negara sebagai aktor rasional pasti ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Meskipun selain kelangsungan hidup, ada juga kepentingan lain yang ingin diraih negara, namun kepentingan tersebut dikategorikan sebagai *low politics* yang berarti posisinya tidak lebih penting dari kelangsungan hidup atau keamanan yang merupakan *high politics*. Mulanya, realisme defensif diperkenalkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya *Theories of International Politics*. Sama seperti pemikir neorealis lainnya, Kenneth Waltz berpendapat bahwa situasi sistem internasional yang anarkis mendorong negara membuat kebijakan defensif yang moderat. Menurut Waltz (1979), negara secara alamiah tidak agresif. Ia mengatakan “Perhatian utama negara bukanlah untuk meraup sumber daya sebanyak mungkin dengan merampas dari negara lain, tapi memaksimalkan kekuasaan untuk mempertahankan posisi negara dalam sistem internasional.” (Waltz, 1979). Sebaliknya, realisme ofensif beranjak dari pemikiran bahwa sistem internasional yang anarkis membuat negara bersikap agresif dalam upayanya untuk meningkatkan kekuatan militer karena dunia telah dikutuk menjadi medan kompetisi antar kekuatan.

Di kutip dari buku *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (Baylis & Smith, 2005), Waltz menjelaskan:

The nature of international politics forces all states to focus on preserving their own independence by forming balancing coalitions rather than on maximizing their own power. Thus, even expansionist states cannot let power, a possibly useful means, become the end they pursue. The goal the system encourages them to seek is security. Increased power may or may not serve the end. (Baylis & Smith, 2005)

Merujuk argumen di atas, meskipun Waltz menjelaskan ekspansi kekuatan negara bukanlah tujuan akhir dari upaya negara untuk mencapai keamanan nasional, ia pun mengakui jika ekspansi kekuatan yang dilakukan secara agresif oleh suatu negara dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mempertahankan keamanan nasionalnya. Oleh sebab itulah realisme defensif percaya demi mencapai keamanan yang dicita-citakan, negara kemudian melakukan *self-help* dalam bentuk memperkuat militernya.

Realisme defensif berpendapat bahwa ekspansi dan penaklukan yang dilakukan negara berdaulat sangat berisiko juga sulit terwujud, khususnya di zaman di mana konsep nasionalisme modern telah terbentuk. Bagi negara, tindakan preventif yang berorientasi pada diri sendiri dengan meningkatkan pertahanan melalui pembangunan alutsista militer jauh lebih rasional dari pada perilaku agresif yang bermaksud untuk menguasai negara lain. Infrastruktur yang rusak karena proses penaklukan negara lain pun bisa jadi hal yang sangat merugikan bagi negara (Wagner, 2007).

Realisme defensif secara khusus juga membedakan antara keamanan individu dan keamanan negara. Robert Jarvis (1978) menyatakan “*States are not as vulnerable as men are in a state of nature.*”, menurutnya negara tidak sama dengan manusia yang secara alamiah sangat rentan terhadap konflik dan sikap agresif yang merusak. Negara, khususnya negara-negara besar atau yang biasa disebut negara adidaya biasanya lebih statis, mereka bisa menunggu sampai menemukan bukti adanya ancaman dari negara lain dari pada bertindak reaktif terhadap ancaman yang masih bersifat gertakan (Jervis, 1978, hal. 172).

Amerika Serikat selaku negara adidaya mengamini konsep realisme defensif dengan terus melakukan ekspansi militer di bidang pertahanan dan keamanan. Pendekatan realisme defensif ini pun sering diasosiasikan sebagai kunci keberhasilan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I. Banyak ahli sepakat jika Amerika melakukan upaya ofensif pada Perang Dunia I mustahil Amerika Serikat dapat menjamin keamanan negaranya (Walt, 1998, hal. 29-32, 34-46).

Uji coba senjata nuklir Korea Utara pada tanggal 3 September 2017 tercatat sebagai ledakan senjata nuklir terbesar sepanjang sejarah. Daya ledaknya bahkan 4-5 kali lebih besar dari bom atom yang pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Merespon ancaman tersebut, Amerika Serikat kembali menggunakan pendekatan realisme defensif. Upaya penguatan pertahanan dilakukan Amerika Serikat di wilayah-wilayah strategis seperti Korea Selatan, Jepang dan Guam. Korea Selatan pada saat itu meyakini akan adanya uji coba senjata nuklir lanjutan, Perdana Menteri Korea Selatan, Jung Hong-won menyampaikan “Situasi saat ini sangat mencekam. Sepertinya tidak banyak waktu yang tersisa sebelum Korea Utara merampungkan persenjataan nuklirnya” (Lee & Griffiths, 2017). Oleh karena itu Amerika Serikat kemudian memrintahkan militernya untuk mempercepat proses instalasi Sistem Pertahanan Anti-rudal atau *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Seongjo, Korea Selatan yang awalnya dijadwalkan selesai akhir tahun (Choe, 2017). Sistem Pertahanan Anti-

rudal milik Amerika Serikat ini adalah sistem pertahanan paling canggih di dunia yang dirancang khusus untuk menembak jatuh rudal balistik pada fase terminal sebelum mendekati target.

Selain memperkuat koalisi dengan Korea Selatan, Amerika Serikat juga menggandeng Jepang dalam penanggulangan ancaman senjata nuklir Korea Utara melalui pengiriman pesawat pengebom (*bombers*) untuk bergabung bersama pasukan pertahanan di Jepang serta Korea Selatan (CBS News, 2017). Setelah itu Amerika Serikat semakin serius menjalin kerja sama dengan sekutunya Jepang. Pada tanggal 17 Januari 2018 Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono bertemu di Vancouver, Canada untuk menyepakati peningkatan kerja sama pertahanan di wilayah Asia Timur. Tidak hanya itu, kebijakan Amerika Serikat menambah anggaran pertahanan menjadi US\$ 761 milyar turut serta memperkuat pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Samudra Pasifik yang berdekatan dengan Korea Utara, yaitu Andersen Air Force Base & Naval Base Guam. Beberapa hari setelah uji coba senjata nuklir Korea Utara, pangkalan militer Amerika Serikat di Guam menjawab ancaman tersebut dengan mengirim pesawat tempur berjenis *bomber* B-1 terbang selama 10 jam di wilayah perbatasan Korea Utara-Korea Selatan untuk menunjukkan kekuatan (*show of power*) sekaligus mengertak Korea Utara. (Stein & Gregg, 2019).

1.3.2 Dilema Keamanan (*Security Dilemma*)

Sama halnya dengan realisme defensif, teori dilema keamanan juga merupakan turunan dari pemikiran realisme. Dilema keamanan atau model spiral mengacu pada situasi dimana tindakan yang diambil negara untuk memperkuat keamanannya seperti membangun militer atau membuat aliansi dapat memaksa negara lain merasa terancam dan kemudian mengambil tindakan yang sama. Situasi ini mengakibatkan bertambahnya ketegangan antar negara yang bisa saja berujung pada konflik yang tidak diinginkan.

Contoh nyatanya dapat kita lihat pada peristiwa Perang Dunia I, sejumlah ahli berpendapat bahwa Eropa pada masa itu terpaksa berperang karena merasa tidak aman akibat munculnya aliansi-aliansi negara tetangga; blok sekutu dan blok sentral. Padahal diyakini Eropa sendiri tidak menginginkan adanya perang. Selain itu, Rencana Schlieffen milik Jerman yang dibuat untuk menghindari kemungkinan berperang di dua medan dengan memobilisasi pasukannya secara cepat diyakini menjadi pemicu negara lain melakukan hal yang sama. Meskipun begitu, banyak juga ahli yang berpendapat jika Perang Dunia I memang terjadi karena masing-masing pihak menginginkan pertumpahan darah.

Dilema keamanan adalah konsep yang pertama kali diteoritisasi sekaligus diperkenalkan oleh John H. Herz dari Jerman (1951) dalam buku *Political Realism and Political Idealism* dan Herbert Butterfield asal Inggris (1951) dalam bukunya yang berjudul *History and Human Relations*. Sebagai seorang pemikir realis klasik, John Herz mendefinisikan dilema keamanan sebagai “A structural notion in which the self-help attempts of states to look after their security needs tend, regardless of intention, to lead to rising insecurity for others as each interprets its own measures as defensive and measures of others as potentially threatening.” (Herz, 1951). Singkatnya, bagi Herz, upaya *self-help* yang dilakukan negara untuk memperkuat militernya, terlepas dari niatnya yang didasarkan pada keamanan negara sendiri justru meningkatkan rasa tidak aman bagi negara lain yang kemudian menafsirkannya sebagai ancaman. Butterfield disisi lain lebih menekankan dilema keamanan sebagai ketidakmampuan pembuat kebijakan dalam menghadapi ketakutannya terhadap ancaman (Butterfield, 1951).

Skenario-skenario yang dapat dilakukan negara untuk memperkuat keamanannya, diurutkan dari yang paling masuk akal (Jervis, 1978), antara lain; (1) membangun kerja sama/aliansi dan melakukan pelucutan senjata terhadap semua negara, (2) mempertahankan militer yang kuat sementara militer negara lain dilucuti, (3) berkompetisi membangun militer yang kuat tapi berhadapan dengan risiko perang yang tinggi, (4) dilucuti sementara negara lain dipersenjatai. Dilema keamanan digerakkan oleh keinginan untuk terhindar dari eksploitasi negara lain. Eksploitasi negara lain terhadap negara sendiri sama artinya negara kehilangan kedaulatannya. Sehingga berdasarkan kemungkinan-kemungkinan di atas, jelas jika memperkuat militer menjadi kewajiban bagi negara yang ingin menghindari skenario (4).

Jervis juga menyoroti sikap alami negara yang subjektif dalam memandang keamanan. Negara bisa saja mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai upaya untuk mengancam keamanan dirinya, padahal di sisi lain bisa saja aktivitas tersebut dimaksudkan untuk hal lain. Subjektivitas ini membuat negara tidak mampu mengukur sejauh mana kerja sama dapat dilakukan atau sebesar apa ancaman yang mereka hadapi. Ketidakjelasan inilah yang membuat negara hanya dapat berpegang pada diri sendiri dengan melakukan *self-help* (Jervis, 1978).

Sama seperti realisme defensif, akar permasalahan dilema keamanan tidak lain adalah sistem internasional yang bersifat anarki. Sistem internasional yang anarki memaksa setiap negara untuk berusaha sendiri, hasilnya upaya yang dilakukan negara tidak jauh dari memaksimalkan kekuatan (*power*) seperti membentuk aliansi dengan negara lain,

meningkatkan persenjataan, dan mengembangkan teknologi militer. Situasi ini menyebabkan dilema bagi negara-negara di dunia, pasalnya peningkatan kekuatan suatu negara sama dengan pelemahan kekuatan negara lain (Wagner, 2007).

Pelemahan kekuatan negara lain tidak secara otomatis membuat situasi menjadi dilema. Namun kecenderungan negara yang melemah tersebut untuk ikut memaksimalkan kekuatannya lah yang melahirkan situasi dilema. Semakin kuat suatu negara, semakin negara lain mengikuti jejak negara tersebut demi mencapai *balance of power* atau kesetaraan kekuatan. Terlebih, negara tidak pernah tahu motif dari pemaksimalan kekuatan negara lain, bisa jadi pemaksimalan kekuatan itu dimaksudkan untuk menyerang atau menghegemoni negara-negara di dunia. Atas dasar itulah negara yang khawatir akan adanya ancaman, serangan, atau dominasi dari negara luar kemudian berupaya untuk memaksimalkan kekuatannya dengan turut serta memperkuat militer dan pertahanan (Wivel, 2011). Secara singkat konsep dilema keamanan dapat kita pahami dengan menilik dua premis utama di bawah:

1. Peningkatan kekuatan suatu negara sama dengan pelemahan kekuatan negara lain.
2. Tidak ada satupun negara yang yakin peningkatan kekuatan negara lain dapat menjamin negara tersebut tidak menyerang negaranya.

Dalam studi kasus ini, Amerika Serikat tidak bisa tinggal diam ketika Korea Utara semakin gencar mengembangkan program senjata nuklirnya. Penambahan kekuatan militer Korea Utara melalui pengembangan senjata nuklir menyebabkan Amerika Serikat khawatir akan kemungkinan terburuk penggunaan senjata nuklir melawan dirinya. Terlebih setelah adanya ancaman serangan senjata nuklir yang dideklarasikan oleh Korea Utara pasca pernyataan Presiden Donald Trump yang mengatakan setiap negara yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat akan berhadapan dengan ‘api dan amarah’⁴ (Chambers & Graham, 2017). Amerika Serikat merespon ancaman Korea Utara dengan mengirimkan tambahan pesawat pengebom siluman (*US Stealth Bombers*) B-2 ke Guam untuk bergabung dengan unit B-1 dan B52s sebagai bentuk pertahanan taktis demi menghadang serangan senjata nuklir Korea Utara (Chambers & Graham, 2017).

⁴ *Fire and Fury*

1.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan mengacu pada kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil hipotesis upaya Amerika Serikat dalam memanfaatkan posisi strategis Guam sebagai wilayah *unincorporated territory* untuk menghadang agresivitas pengembangan senjata nuklir Korea Utara dilakukan dengan cara:

1. Amerika Serikat terus mengencarkan politik keamanannya di wilayah Samudra Pasifik, khususnya negara-negara sekutu seperti Korea Selatan dan Jepang dengan tetap mengandalkan diplomasi melalui PBB.
2. Amerika Serikat memanfaatkan posisi strategis Guam sebagai ‘ujung tombak’ yang berdekatan dengan lokasi Korea Utara untuk menjangkau Guam secara cepat baik dalam menginisiasi serangan ataupun melancarkan serangan balik apabila konflik tidak terhindarkan.
3. Amerika Serikat menggagahi Korea Utara dengan terus memperkuat pertahanan Guam. Berbagai armada militer canggih dikirim dan dipersiapkan berjaga di pangkalan-pangkalan militer Guam. Terlebih persebaran pangkalan-pangkalan militer di Guam yang tidak terfokus membuatnya sulit dihancurkan dalam satu serangan.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian karya tulis ini adalah untuk:

1. Mengetahui arti penting posisi strategis Guam sebagai wilayah *unincorporated territory* dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan nasional Amerika Serikat.
2. Menganalisis upaya Amerika Serikat dalam memanfaatkan posisi strategis Guam sebagai wilayah *unincorporated territory* untuk menghadang agresivitas Korea Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian karya tulis ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis karya tulis ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang terkait dengan topik keamanan, aliran pemikiran realisme seperti realisme defensif dan dilema keamanan, juga memberikan pengetahuan mendalam terhadap kajian Amerika Serikat sekaligus wilayah *unincorporated territory*-nya. Karya tulis ini juga merupakan sumbangsih pengetahuan bagi

peneliti dalam mengkaji posisi strategis Guam yang dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk menghadang agresivitas program senjata nuklir milik Korea Utara.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil karya tulis ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengimplementasian pemikiran realisme defensif dan dilema keamanan melalui aktor nyata Hubungan Internasional yaitu Amerika Serikat, mengetahui bagaimana perilaku Amerika Serikat dan apa saja upaya Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman keamanannya, yaitu agresivitas program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Karya tulis ini dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan ataupun praktisi Hubungan Internasional sebelum membuat keputusan ataupun kebijakan luar negeri dalam menghadapi isu-isu pertahanan dan keamanan sekaligus memberikan dimensi wawasan baru terhadap isu-isu kontemporer Hubungan Internasional.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Deskriptif Analitik

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah metode deskriptif analitik. Deskriptif analitik artinya karya tulis ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran mengenai objek yang diteliti. Namun, penulis juga melakukan analisis terhadap data rujukan dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah teknik Paradigma Studi Kasus. Rahardjo dan Gudnanto (2011) dalam bukunya “Pemahaman Individu Teknik Non Tes” menerangkan bahwa Studi Kasus merupakan suatu metode untuk memahami subjek dan objek secara integratif serta komprehensif (Rahardjo & Gudnanto, 2011). Data yang dikumpulkan penulis berupa data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti jurnal, buku, dan lainnya, termasuk *e-book* atau tulisan elektronik yang berasal dari internet dengan tetap memperhatikan kualitas sumber yang dijadikan rujukan.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisa data kualitatif. Analisa kualitatif adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang tidak bergantung pada angka, karenanya karya tulis ini lebih menekankan pada kualitas data yang dijadikan rujukan. Proses analisis data kualitatif digunakan untuk mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak dapat diukur dengan angka (Sugiyono, 2013).

Adapun teknik analisa data kualitatif ini terbagi dalam beberapa tahapan proses (Sugiyono, 2013):

1. Memilah dan menyusun data yang telah dikumpulkan ke dalam jenis yang berbeda menurut sumber informasi.
2. Membangun sebuah *general sense* atas informasi yang diperoleh serta merefleksikan makna yang telah didapat secara keseluruhan sehingga penulis dapat menungkap esensi dari sebuah gagasan yang tidak dapat diukur dengan angka.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Demi menjaga efektivitas karya tulis, maka penulis membatasi jangkauan penelitian agar pembahasannya tetap terarah dan tidak meluas. Adapun batasan waktu yang penulis jadikan patokan terhitung dari tahun 2016—Saat Korea Utara semakin agresif mengembangkan *Inter-Continental Ballistic Missile Program* (ICBC) miliknya—hingga tahun 2019—waktu tulisan ini dibuat, meskipun tidak menutup kemungkinan ada sebagian data lampau yang digunakan untuk mendukung komprehensivitas karya tulis.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, penulis membagi sistematika penulisan pada karya tulis ini ke dalam empat (4) bab, yaitu:

Bab I, menjelaskan mengenai latar belakang masalah Amerika Serikat memanfaatkan Guam dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang dinamika hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara, profil Korea Utara, profil Amerika Serikat sekaligus hubungannya dengan Guam sebagai wilayah *unincorporated territory*, kebijakan luar negeri, kebijakan masa kini, dan sikapnya terhadap ancaman, khususnya Korea Utara.

Bab III, menyajikan paparan bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan posisi strategis Guam dalam menghadapi ancaman pengembangan program senjata nuklir Korea Utara demi mencapai keamanan nasionalnya.

Bab IV, berisi kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian lebih lanjut sekaligus menutup karya tulis ini.